



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : SMALL DAN MEDIUM BUSINESS DIRECTORATE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMAM SUKRIYANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR BISNIS KECIL DAN MENENGAH**
3. NHK : **250031**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/48 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/220 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m²/270 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1144 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.823.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VOXY MPV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, HERLEY DAVIDSON XL 883 L Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 399.000.000
3. MOTOR, HONDA C125K Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPARD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 3.120.003.940



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.232.213.233
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.999.427.415
Sub Total	Rp.	17.939.644.588
III. HUTANG	Rp.	800.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.139.644.588

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.